

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS OLEH KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) DI KOTA PONTIANAK

Junaidi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Email: angde.firdaus@yahoo.com

ABSTRAK

Kata kunci: Penanggulangan HIV/AIDS, Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS, Kerjasama Institusi

Artikel ini mengangkat tema mengenai HIV/AIDS yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan proses implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Permasalahan yang paling mendasar di dalam artikel ini yaitu terfokus pada proses implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Pontianak dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan proses penanggulangan HIV/AIDS di kota Pontianak ini belum berhasil. Adapun ketercapaian secara nyata atau hasil dari tujuan kebijakan KPA Kota Pontianak dalam menanggulangi HIV/AIDS adalah dari segi kompetensi masyarakat itu sendiri, masyarakat sekarang semakin paham akan informasi tentang HIV/AIDS dan sadar atau peka terhadap lingkungan sekitarnya, apabila tetangga atau kerabat yang mengalami gejala-gejala atau perilaku beresiko mengenai HIV/AIDS, untuk menuntun atau paling tidak memberikan masukan bahwa tetangga atau kerabatnya tersebut untuk segera memeriksakan dirinya di klinik atau di rumah sakit terdekat terkait masalah HIV/AIDS.

ABSTRACT

Keywords: Countermeasures HIV/AIDS, Socialization Danger of HIV/AIDS, Institutional Cooperation

This article is the theme of HIV/AIDS which is intended to provide an understanding of the implementation process of the policy implementation of HIV/AIDS. The most fundamental issue in this article is focused on the process of policy implementation of HIV/AIDS by AIDS Commission in Pontianak and what factors are causing the response to HIV/AIDS in the city of Pontianak has not succeeded. The real achievement of policy objectives or results KPA Pontianak in tackling HIV/AIDS in terms of the competence of the people themselves, the public is now more aware of the information about HIV/AIDS and is aware of the surroundings, if neighbors or relatives who have symptoms-symptoms or risk behavior regarding HIV/AIDS, to lead or at least provide input that the neighbors or relatives to immediately check themselves in the clinic or at a nearby hospital related to HIV/AIDS.

A. PENDAHULUAN

Penyakit *HIV/AIDS* yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sebenarnya adalah sebuah penyakit dan bahkan sudah menjadi endemi sosial bukan hanya endemi kesehatan semata. Hal ini bisa dilihat dari pola penyebaran *HIV/AIDS* melalui hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, prostitusi, penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti, tidak steril, dan biasanya dilakukan untuk narkoba, penularan dari suami kepada istri, dari ibu kepada bayi dan tranfusi darah. Terkait dengan penanggulangan dan pencegahan penyakit *HIV/AIDS* ini pemerintah daerah kota/kabupaten mempunyai tugas untuk melakukannya.

Selama ini upaya-upaya pemerintah dalam penanganan *HIV/AIDS* telah diaktualisasikan melalui kebijakan diantaranya: (1) Mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1285 tahun 2002 tentang Pedoman Penanggulangan *HIV/AIDS* dan Penyakit Menular Seksual. (2) Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tanggal 15 Juni 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat. (3) Mengeluarkan Surat keputusan Walikota Pontianak nomor 226 tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pontianak. (4) Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dimana KPA ini sendiri cakupan kerjanya tersebar di setiap Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak nomor 226 tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pontianak memiliki tugas sebagai berikut: mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi penanggulangan AIDS Nasional, memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten/Kota, menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari Pusat, Daerah, Masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota.

KPA Kota Pontianak sebagai salah satu lembaga yang direkomendasikan untuk dilibatkan sebagai Tim Pelaksana untuk melakukan suatu penyusunan Penyelenggaraan

Pelayanan kesehatan Reproduksi Kalimantan Barat. Kegiatan AIDS Competence di 25 RT merupakan salah satu prioritas intervensi Program di 6 Kecamatan se-Kota Pontianak berupa Pertemuan Penilaian diri, Pertemuan membangun Mimpi. Pertemuan penilaian diri dimaksudkan agar para peserta mampu mengenali diri mereka masing-masing dan mampu menempatkan diri mereka apabila sudah berada di lingkungan sosial masyarakat. Pertemuan membangun mimpi di maksudkan agar peserta mampu untuk membangun mimpinya agar tidak hanya sebatas angan-angan saja, melainkan sebuah keyakinan yang harus di wujudkan.

Sosialisasi HIV dan AIDS di sekolah-sekolah bekerjasama dengan Program Pembinaan wilayah Puskesmas Kom Yos Sudarso, dimaksudkan agar dari usia dini para pelajar di Kota Pontianak sudah mengenal apa itu HIV dan AIDS, apa bahayanya, apa dampak yang timbul dari HIV dan AIDS tersebut dan bagaimana cara pencegahannya. Sosialisasi HIV dan AIDS di 6 Kecamatan di Kota Pontianak dilakukan agar tidak hanya di tempat-tempat tertentu saja yang mendapatkan sosialisasi, tetapi di kecamatan-kecamatan juga mendapatkan bagian mengenai penjelasan mengenai apa itu HIV dan AIDS. Peningkatan Kapasitas Staf Manajemen KPA Kota Pontianak ini harus dilakukan karena dengan meningkatkan kapasitas staf manajemen, diharapkan kedepannya kinerja dari KPA Kota Pontianak ini sendiri dapat berjalan lebih baik lagi.

Pemerintah sebagai penyelenggara tugas dan fungsi negara sebenarnya yang punya peran dan posisi sentral dan strategis untuk melakukan penanganan kasus *HIV/AIDS* ini. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah punya kewajiban dan tugas untuk melakukan penanganan kesehatan dan penanggulangan masalah sosial. Pemerintah daerah dapat merancang dan mengkoordinasikan aksi bersama bersama seluruh elemen masyarakat, yang kongkrit dan rutin, dalam rangka penanganan dan pencegahan *HIV/AIDS*.

Oleh karena itu kehadiran Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Pontianak diharapkan mampu menjadi lembaga otoritas yang handal dan beribawa dalam menentukan kebijakan dan melakukan koordinasi terhadap semua elemen kekuatan yang dimiliki oleh bangsa ini untuk menanggulangi AIDS. Lebih jauh lagi peningkatan *HIV/AIDS* ini disebabkan salah satu faktornya dari ketidakterjangkaunya masyarakat dari aspek penyuluhan-penyuluhan bidang kesehatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang peduli terhadap *HIV/AIDS* itu sendiri.

Pemerintah disini yang dibantu oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di tiap-tiap daerah bekerja sama dengan instansi terkait dan dibantu dengan tenaga yang ada bagaimana caranya agar angka *HIV/AIDS* yang semakin tahun semakin meningkat ini tidak semakin bertambah, salah satunya dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat langsung atau ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, memberikan suatu penjelasan bahwa *HIV/AIDS* itu sangat berbahaya dan harus sedini mungkin dihindari. Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan proses penanggulangan *HIV/AIDS* ini belum berhasil. Rumusan Permasalahan : “Bagaimana proses implementasi kebijakan penanggulangan *HIV/AIDS* oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Kota Pontianak dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan penanggulangan *HIV/AIDS* ini belum berhasil”. Tujuan Penelitian :(a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penanggulangan *HIV/AIDS* oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Kota Pontianak. (b) Ingin mengeksplor dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab meningkatnya angka *HIV/AIDS* di Kota Pontianak

B. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN *HIV/AIDS* OLEH KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)

1. Sosialisasi Bahaya *HIV/AIDS*

Istilah kebijakan publik adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*public policy*” yang diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Ada juga yang menterjemahkan sebagai kebijakan Negara atau kebijakan pemerintah (Islamy 1988:2).

Dalam implementasi suatu kebijakan, menurut Agustino (2006:139) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

Angka perkembangan kasus *HIV/AIDS* di Kota Pontianak dari tahun ketahun semakin meningkat. Tingginya kasus *HIV/AIDS* di Kota Pontianak ini yang menjadi dasar bagi pemerintah sebagai penyelenggara tugas dan fungsi negara sebenarnya yang punya peran dan posisi sentral dan strategis untuk melakukan penanganan kasus *HIV/AIDS* ini.

Pemerintah disini yang dibantu oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di tiap-tiap daerah bekerja sama dengan instansi terkait dan dibantu dengan tenaga yang ada bagaimana caranya agar angka *HIV/AIDS* semakin tahun semakin meningkat ini tidak semakin bertambah. Salah satunya adalah dengan cara memberikan

penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat langsung atau ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, memberikan suatu penjelasan bahwa *HIV/AIDS* itu sangat berbahaya dan harus sedini mungkin dihindari.

2. Kerjasama Institusi

Menurut Thomas R. Dye (dalam Pasolong:2008:39) mendeskripsikan bahwa kebijakan publik tersebut “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dari konsep Dye tersebut apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Menurut Charles O’ Jones (dalam Nawawi 2009:132-133) implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut:(1) Organisasi: Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya unit-unit serta metode untuk menjadikan kebijakan berjalan. (2) Interpretasi: Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. (3) Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Kerjasama dengan pihak terkait dilakukan oleh KPA Kota Pontianak guna menunjang peningkatan kinerja penanggulangan *HIV/AIDS* tersebut, diantaranya dengan bekerjasama dengan melibatkan semua stekholder, dengan kebutuhan yang berbeda serta tujuan yang sama yaitu pencegahan *HIV/AIDS* serta beberapa LSM.

Selain itu melakukan sosialisasi kebijakan dan renstra dengan melibatkan semua anggota yang tergabung dalam SKPD Kota Pontianak. Upaya ini merupakan realisasi dalam memenuhi ketetapan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan *HIV/AIDS* memerlukan berbagai pendekatan dan diselenggarakan oleh berbagai pihak dimana peran utama dijalankan oleh masyarakat dengan mendapat arahan dari sektor-sektor pemerintah yang berperan sebagai pemimpin dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *HIV/AIDS*.

Penyebaran angka *HIV/AIDS* di Kota Pontianak ini sudah tersebar di semua kecamatan yang ada di kota Pontianak ini. Implementasi kebijakan penanggulangan *HIV/AIDS* oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka laju pertumbuhan *HIV/AIDS* yang ada di Kota Pontianak dengan tujuan agar masyarakat semakin paham dan mengerti bahwa *HIV/AIDS*

itu sangat berbahaya. dengan diberikan penyuluhan dan informasi oleh Komisi Penanggulangan AIDS ini diharapkan masyarakat dapat memberikan informasi yang mereka dapat kepada saudara atau orang disekitar mereka bahwa penyakit HIV/AIDS sangat berbahaya bahkan mematikan.

Agar semua tujuan tersebut dapat terwujud para pelaku kebijakan harus mengimplementasikan program tersebut sebaik mungkin. Jika suatu program dilaksanakan dengan baik serta didukung dengan implementor yang berkompeten dibidangnya maka tujuan dari program tersebut dapat dicapai dengan hasil yang baik.

C. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dan eksploratif. Menurut Faisal (2005:20), penelitian deskriptif yang biasa disebut penelitian taksonomik (*taxonomic research*) dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsi sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Menurut Subyantoro (2007:74) penelitian eksploratif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan mencari dan menemukan masalah-masalah baru dalam usaha mengisi kekosongan atau kekurangan dari pengetahuan, baik yang belum maupun telah ada. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian eksploratif bertujuan memperdalam pengetahuan tentang suatu gejala dalam rangka merumuskan masalah secara terperinci.

Informan penelitian sebagai berikut:(1) Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak. (2) Petugas KPA Kota Pontianak yang terdiri dari 3 (tiga) orang (Penanggungjawab Program, Pengelola Program LSL, dan Koordinator Fasilitator Kecamatan). (3) Penderita HIV/AIDS yang terdiri dari 2 (dua) orang. Analisis data, analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung, wawancara yang mendalam dan mendokumentasikan objek yang menjadi bahan penelitian.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS OLEH KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) DI KOTA PONTIANAK

1. Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam hal kebijakan dan koordinasi, KPA Kota

Pontianak menjadi pemimpin dalam mendorong keterlibatan semua sektor terkait dan semua elemen masyarakat untuk turut serta melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Wawancara peneliti dengan petugas KPA Kota Pontianak yakni Pengelola Program LSL mengenai kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPA Kota Pontianak: "Dalam menanggulangi masalah HIV/AIDS di Kota Pontianak kita terlebih dahulu melakukan sosialisasi, penyuluhan terkait HIV/AIDS ke tempat-tempat resiko AIDS. Harapannya adalah mereka bisa menyampaikan informasi ini ke lembaganya masing-masing serta teman-teman sebayanya tentang informasi terkait HIV/AIDS".

KPA Kota Pontianak telah mengimplementasikan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS ini melalui sosialisasi, penyuluhan serta advokasi ke beberapa stakeholder yang ada di Kota Pontianak. Dengan melakukan sosialisasi, maka kebijakan penanggulangan HIV/AIDS telah di realisasikan sesuai dengan tujuan dari KPA Kota Pontianak sendiri yaitu mengurangi penularan dan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kota Pontianak.

Pelaku kebijakan juga harus mengerti dan memahami dengan benar isi dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Karena keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berhubungan erat dengan kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Kota Pontianak: "KPA merupakan lembaga pemerintahan yang non struktural dimana pemerintah kota Pontianak sebagai Ketua Umum di organisasi ini, anggotanya adalah seluruh SKPD yang berada di pemerintahan Kota Pontianak. Dengan demikian KPA merupakan mitra dari pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak, Pihak-pihak yang dilibatkan oleh KPA Kota Pontianak adalah semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kota Pontianak serta Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Pontianak, seperti Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), kelompok beresiko tinggi, masyarakat umum, RT/RW, posyandu, dan lain-lain".

Terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPA kota Pontianak mengenai penanggulangan HIV/AIDS, berikut jawaban responden: "Pihak KPA sendiri ada melakukan sosialisasi terkait penanggulangan HIV/AIDS ini diantaranya dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai bahayanya HIV/AIDS dan memberikan edukasi mengenai HIV/AIDS yang sebelumnya kami sendiri tidak mengetahuinya".

Kegiatan-kegiatan dari pencegahan dalam bentuk penyuluhan, promosi hidup sehat, pendidikan sampai kepada cara menggunakan alat pencegahan yang efektif dikemas sesuai dengan sasaran upaya pencegahan. Di mana kelompok sasaran tersebut terbagi atas kelompok tertular. Artinya, kelompok tertular adalah mereka yang sudah terinfeksi HIV. Pencegahan ditujukan untuk menghambat lajunya perkembangan HIV, memelihara produktivitas individu dan meningkatkan kualitas hidup.

Kelompok berisiko tertular atau rawan tertular, Artinya kelompok berisiko tertular adalah mereka yang berperilaku sedemikian rupa sehingga sangat berisiko untuk tertular HIV. Dalam kelompok ini, termasuk penaja seks baik perempuan maupun laki-laki, pelanggan penaja seks, penyalahguna napza suntik dan pasangannya, waria penaja seks dan pasangannya serta lelaki suka lelaki. Karena kekhususannya, narapidana termasuk dalam kelompok ini. Pencegahan untuk kelompok ini ditujukan untuk mengubah perilaku berisiko menjadi perilaku aman.

2. Kerjasama KPA Kota Pontianak Dengan Instansi Terkait Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak

Untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai pandangan negative atau penilaian buruk untuk penderita HIV/AIDS ini diperlukan kerjasama pemerintah dengan organisasi masyarakat, pemuka agama, LSM dan lain-lain dalam menyampaikan informasi terkait masalah HIV/AIDS ini. Sasaran KPA Kota Pontianak untuk melakukan pencegahan, dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan perilaku kelompok dan potensi ancaman yang dihadapi.

Wawancara dengan Penanggungjawab Program KPA Kota Pontianak terkait kerjasama yang dilakukan KPA Kota Pontianak dengan Instansi terkait: "Upaya kita dalam Penanggulangan HIV di Kota Pontianak ini sudah menginisiasi Perda (memulai berfikir untuk membuat perda), strategi rencana aksi Kota Pontianak. Mengenai Perda HIV/AIDS sudah diinisiasi, selain itu KPA Kota Pontianak bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi membentuk Kesehatan Produksi (Kespro), bekerja sama dengan DPRD Provinsi, bekerja sama dengan layanan kesehatan, outlet kondom dapat dijangkau dengan mudah, serta populasi kunci".

Pemerintah Kota Pontianak melalui KPA Kota Pontianak telah melakukan upaya-upaya terkait penanggulangan HIV/AIDS diantaranya adalah program pencegahan HIV/AIDS dari transmisi seksual yang memiliki resiko tinggi terhadap HIV/AIDS ini. Diharapkan

dengan upaya yang telah dilakukan KPA Kota Pontianak, masalah yang timbul mengenai HIV/AIDS ini lambat laun akan menurun.

Berkaitan dengan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang bekerjasama dari pihak KPA Kota Pontianak dalam memantau kesehatan penderita HIV/AIDS berikut jawaban responden (penderita HIV/AIDS): "Kita diberi pendamping dari petugas lapangan klinik di Jalan Ali yang dalam memantau atau mengawasi perkembangan kesehatan kita".

Dari Selanjutnya dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau dari pihak pemerintah daerah dalam memantau kesehatan penderita HIV/AIDS, sudah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban responden bahwa kegiatan pengawasan itu dilakukan dalam bentuk pemberian pendamping kepada penderita. Dengan adanya pemberian pendamping, maka pemerintah tidak melepaskan mereka begitu saja. Tetapi mereka benar-benar mendapatkan perawatan khusus dari pendamping yang sudah terlatih tersebut.

Wawancara peneliti dengan petugas KPA Kota Pontianak yakni Koordinator Fasilitator Kecamatan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh KPA Kota Pontianak dengan instansi terkait, mengenai penanggulangan HIV/AIDS, berikut kutipan wawancara: "Kerjasama yang telah dilakukan terkait penanggulangan HIV/AIDS dengan instansi yang mendukung di Kota Pontianak sudah cukup banyak antara lain meningkatkan pendekatan kepada legislative dan eksekutif, kemudian kepada tokoh masyarakat, membuat strategi program biar penanggulangan HIV/AIDS ini tahu dan paham AIDS, dan paham kesehatan Produksi (Kespro)".

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa KPA Kota Pontianak telah bekerjasama dengan para instansi terkait berkenaan dengan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak, ini dimaksudkan karena KPA Kota Pontianak tidak bisa berdiri sendiri bekerja dalam menanggulangi masalah penyakit HIV/AIDS ini, dan di perlukan kerjasama dengan para pelaku kebijakan lainnya agar apa yang hendak dicapai selama ini yaitu menurunnya angka HIV/AIDS dapat terwujud dengan semestinya sesuai dengan kapasitas kerja dari masing-masing instansi tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian mengenai proses implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS

(KPA) di Kota Pontianak ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit HIV/AIDS. Agar kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit HIV/AIDS ini semakin meningkat hendaknya pihak KPA Kota Pontianak sebagai pelaku kebijakan harus lebih giat bekerja keras didalam mensosialisasikan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS ini, seperti dengan menambah jumlah anggota dalam KPA itu sendiri, apabila anggota KPA sudah memadai langkah selanjutnya adalah menambah jumlah tempat yang akan disosialisasikan mengenai bahayanya penyakit HIV/AIDS tersebut, agar angka HIV/AIDS di Kota Pontianak dari tahun ketahun mengalami penurunan.
2. Belum adanya tindakan yang lebih dalam penanggulangan HIV/AIDS ini, Koordinasi yang dilakukan diantaranya dengan pembagian tugas, KPA Kota Pontianak sendiri memiliki anggota-anggota yang bisa di percaya untuk melaksanakan proses kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Pihak KPA Kota Pontianak hendaknya harus bertindak lebih jeli lagi didalam penanggulangan HIV/AIDS ini diantaranya dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan,

memberikan informasi dan edukasi mengenai HIV/AIDS agar masyarakat semakin tahu dan sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit HIV/AIDS ini tidak main-main bahkan ada yang menyebabkan kematian.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Faisal, Sanafiah. 2005. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Islamy, Irfan. 1988. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Buari Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subyantoro, Arif. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A.Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Junaidi
NIM / Periode lulus : E0108077 / 6 Maret 2013
Fakultas/Jurusan : ISIP / IA
E-mail address/HP : angde.firdaus@yahoo.com / 08988058391

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi.....IA.M..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Kebijakan Penanggulangan
HIV/AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
di Kota Pontianak

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Drs. Erdy, M.Si

NIP. 196707272005011001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 10 April 2013

(Junaidi)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).